

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Ahmad Zaenal Fanani. 2014. *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori Dan Praktek)*, Penerbit Mandar maju:Bandung.
- Ali Achmad Ghomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat Dan Permasalahannya*, Prestasi Pusaka Publisher:Jakarta.
- Anita D.A. Kolopaking. 2013. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*. PT. Alumni:Bandung.
- Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- A. Muhammad Arfah Pattenreng. 2019. *Hukum Kepemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah "Suatu Kajian Komprehensif"*, Bosowa Publishing Group:Makassar.
- A.P. Parlindungan. 1990. *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)*, Penerbit Mandar Maju:Bandung.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan:Jakarta.
- C.S.T.Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka:Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang. 2015. *Legalisme, Legalistas Dan Kepastian Hukum*, Kencana:Jakarta,
- Elza Syarief. 2014. *PerSertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Kepustakkaan Populer Gramedia: Jakarta.
- _____. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakkaan Populer Gramedia:Jakarta.
- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjito, 2005. *Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tuju Jogya Pustaka: Yogyakarta.

- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media:Yogyakarta.
- K. Wantjik Saleh. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*. Kompas Media Nusantara:Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Muchtar Wahid. 2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah. Cet. 1*. Republika:Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Muh Arief S., Suharno dan Haryo Budhiawan. 2016. *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2016)*, STPN Press:Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2017. *Perbuatan melawan hukum pendekatan kontemporer*, PT Citra Aditya bakti:Jakarta.
- Nur Basuki Winanmo. 2008. *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama:Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Kencana:Jakarta.
- Philipus.M. Hardjo. 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu:Surabaya.
- Prajudi Admosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia:Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika:Jakarta.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti:Bandung.
- R. Soeroso. 2010. *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Dan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Nurbani. 2017. *Penerapan Teori pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers:Jakarta.

- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya:Bandung.
- Soediman Khartohadiprodjo. 2009. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, diktat kuliah PDIH:Bandung.
- Soegeng Pridjodarminto. 1993. *Pegawai Negeri Sipil Posisi, Pengelolaan Dan Pembinaan*, Pradna Paramita:Jakarta.
- Soepomo R. 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita:Jakarta.
- Sopah Maru Hutagalung. 2010. *Praktik Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan)*, Sinar Grafika:Jakarta.
- Sudikno Metrokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Liberty*:Yogyakarta.
- Suhdi, dan Rofi Wahasisa. 2008. *Buku Ajar Pendaftaran Tanah*. Semarang:Universitas Negeri Semarang.
- Urip Santoso. 2006. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana:Jakarta.
- Widhi Handoko. 2014. *Kebijakan Hukum Pertanahan (Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif)*, Thafa Media:Yogyakarta.

Jurnal:

- Damar Ariadi, *Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.)*, Jurnal Reportorium Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Vol. IV No.2 Juli-Desember 2017.
- Fredrik Mayore Saranaung, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Vo. VI/No.1/Jan-Feb/2017.
- Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*, Jurnal Lex Crimen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.Vol. 3 No. 1 (2014).

Indah Sari, *Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum petanahan di Indonesia menurut Undang-Undang pokok agraria (UUPA)*, Jurnal Mitra Manajemen, Volume 9, No. 1, 2017.

Nurul Fitria, Muh. Arfah Pattereng, Zulkifli Makkawaru, *Analisis Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Karena Menjalankan Putusan Pengadilan*, J. Paradigma Administrasi Negara , Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Vol. 3 (2): 117-122, Juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2006, Terjemahan Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Tata Guna Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Acara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Internet:

www.KBBI.web.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2022 pada pukul 13.41 WITA.

<https://jdih.situbondokab.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022 pada pukul 19.54 WITA.

Tesis/Disertasi:

Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Putusan:

H. Bachtiar melawan kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Tresje Ticoalu selaku Tergugat Intervensi berdasarkan perkara Nomor 459 K/TUN/2006 tertanggal 18 Mei 2008.

Tresje Ticoalu melawan ST. hadjerah Dg. Djiah, Dkk berdasarkan perkara Nomor 232/PDT.G/2013/PN.MKS tertanggal 03 Juni 2014.

Tresje Ticoalu Melawan ST. Hadjerah Dg. Djiah, Dkk Berdasarkan Perkara Nomor 273/PDT/2014/PT MKS Tertanggal 08 Oktober 2014.

Tresje Ticoalu Melawan ST. Hadjerah Dg. Djiah, Dkk Berdasarkan Perkara Nomor 3549 K/PDT/2015 Tertanggal 16 Oktober 2015.

Tresje Ticoalu Melawan ST. Hadjerah Dg. Djiah, Dkk Berdasarkan Perkara Nomor 973 PK/Pdt/2020 Tertanggal 01 Oktober 2021.

Bachtiar Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Berdasarkan Perkara Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Mks Tertanggal 13 September 2018

Bachtiar Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Berdasarkan Perkara Nomor 34/PDT/2019/PT MKS Tertanggal 04 Januari 2019.

Bachtiar Melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Berdasarkan Perkara Nomor 1480 K/PDT/2020 Tertanggal 10 Oktober 2020.

Dokumen-dokumen:

1. Surat Keputusan Nomor 119/S.Kep/D/XI/80 tentang surat izin penghunian rumah rekuirasi dalam wilayah kotamadya daerah tingkat

II ujung pandang, oleh Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II ujung
Pandang Abustam, tertanggal 4 Agustus 1980.

2. Surat Nomor 012/325/DCK/VI/2004 yang terbitkan oleh Kepala Dinas
Cipta Karya pada tanggal 18 Juni 2004.
3. Surat Nomor 186/Pend/BN/Pem/2012 yang diterbitkan oleh Kepala
Bagian Tata Pemerintahan Sekertaris Daerah Kota Makassar.

